PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 – PERATURAN BUPATI

2026

PERBUP NO. 10, BD. 2026/NO. 10, 8 HLM. + LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :
- Dasar Pertimbangan Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020); UU No. 1 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020); UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 106 Tahun 2021 (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2025); PP No. 107 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2025; Permendagri No. 80 Tahun 2015 (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018); Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 7 Tahun 2016 (sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2021); Perda Kab. Teluk Bintuni No. 13 Tahun 2020; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 12 Tahun 2023; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 2 Tahun 2026.
- Materi Pokok Peraturan Bupati ini menetapkan rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2025.

CATATAN :
- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 31 Agustus 2026 dan Diundangkan di Bintuni pada tanggal 31 Agustus 2026.